

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLITISI
PEREMPUAN DPRD KABUPATEN MAMASA**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S, IP)
Pada Program Studi Ilmu Politik

Wawan Saldi

F0120527

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

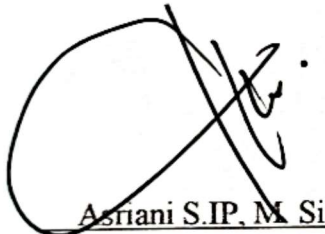
JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA
POLITISI PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN
MAMASA
NAMA : WAWAN SALDI
NIM : F0120527
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi

Majene 24 januari 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Asriani S.IP, M. Si

NIP :198406242019032017

pembimbing II



Fitriani Sari Handayani Razak S. IP.MA

Nip : 199010302022032011

Mengesahkan :

Dekan ilmu sosial dan ilmu politik



Dr. Thamrin Pawalluri . S. Pd .M. Pd.
nip 197001311998021005

SKRIPSI
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLITISI
PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN MAMASA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Wawan saldi

F0120527

Telah di ujikan di depan dewan penguji

Pada tanggal 15 april 2025

Susunan dewan penguji :

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Muhammad Sulthan ,M. Si	Ketua Penguji	
2. Muhammad Syihabuddin. Taufiq, M. A. P	Penguji Utama	
3. Taufik Ikhsan, S. IP. M. Si	Penguji /Anggota	

Pembimbing 1



Asriani, S. IP. M. Si

Nip : 198406242019032017

Pembimbing 2



Fitriani Sari Handayani Razak, S. IP. MA

Nip: 199010302022032011

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Wawan saldi

Nim : F0120527

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan saya terbukti plagiat dan membuat bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene 20 mei 2025



Wawan saldi

ABSTRAK

Persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan di DPRD kabupaten Mamasa cenderung negatif dan masih kurang kepercayaan masyarakat terhadap politisi perempuan ditandai dengan kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Mamasa pada pemilihan legislatif periode 2019-2024. Dalam kalangan masyarakat pada umumnya di kabupaten Mamasa peneliti mengamati bahwa masih banyak masyarakat yang meragukan politisi perempuan dalam setiap kontestasi pemilu, pilkada dan pileg. Sementara peneliti melihat bahwa integritas dan kualitas perempuan dalam hal kepemimpinan tidak kalah hebat dari kaum laki-laki. Secara etimologi, persepsi atau dalam Bahasa Inggris *perception* berasal dari Bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi. Penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Perempuan di DPRD kabupaten Mamasa” peneliti akan menggunakan metode Kuantitatif melalui survey angket kuisioner dengan responden yang berpatokan pada indikator yang telah ditentukan. Dengan demikian data yang terkumpul dalam bentuk angka-angka, gambar dan bukan dalam bentuk deskripsi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, dengan indikator yang telah ditentukan, dengan persepsi Masyarakat terhadap politisi Perempuan DPRD Kabupaten Mamasa sangat baik, dapat dilihat dari hasil penelitian melalui indikator Akuntabilitas (2,25%) Responsivitas (2,03%) efektivitas (2,75%) kualitas kerja (2,73%)

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, Politisi perempuan, anggota DPRD Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan di DPRD kabupaten Mamasa cenderung negatif dan masih kurang kepercayaan masyarakat terhadap politisi perempuan ditandai dengan kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Mamasa pada pemilihan legislatif periode 2019-2024. Posisi perempuan dalam lingkaran kekuasaan politik di kabupaten Mamasa sejak terbentuknya kabupaten Mamasa pada tahun 2002, belum pernah menduduki posisi tertinggi (legislatif) hingga pada hari ini. Lambat laun, dengan beberapa tokoh perempuan mampu mendorong dan memperjuangkan hak-hak dan karir perempuan dimulai dari organisasi PKK, bahkan ada yang ikut partai politik. Meskipun posisi tertinggi dalam kekuasaan politik kabupaten mamasa belum diduduki oleh perempuan, namun secara perlahan persepsi masyarakat kabupaten Mamasa terhadap politisi perempuan perlahan mendukung. Kurangnya partisipasi perempuan di DPRD kabupaten Mamasa tahun 2019, menjadi salah satu latar belakang masalah dalam penulisan penelitian skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Politisi Perempuan di DPRD kabupaten Mamasa Tahun 2019-2024”. Dalam kalangan masyarakat pada umumnya di kabupaten Mamasa peneliti mengamati bahwa masih banyak masyarakat yang meragukan politisi perempuan dalam setiap kontestasi pemilu, pilkada dan pileg. Sementara peneliti melihat bahwa integritas dan kualitas perempuan dalam hal kepemimpinan tidak kalah hebat dari kaum laki-laki. Meskipun keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Mamasa mengalami

peningkatan dari periode sebelumnya, namun tetap saja masih kurang 30% dari jumlah anggota Dewan yang dilantik. Adanya regulasi yang mengatur kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, menjadi bukti bahwa aspirasi perempuan dan keterwakilan perempuan juga diperhatikan oleh Negara sebagai kesetaraan gender dan kedudukan yang sama serta hak yang sama sebagaimana yang diatur dalam konstitusi yang berlaku. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan khususnya perlindungan kekerasan anak dan perempuan yang cenderung masih meraja lelah di Indonesia pada khususnya di kabupaten Mamasa. Penilaian masyarakat terhadap kinerja politisi yang sudah pernah menjabat baik di legislatif maupun eksekutif cenderung berbeda-beda, namun pada umumnya ada permasalahan yang mungkin memaksa beberapa oknum perempuan untuk ikut “arus” dan terlenu dengan lingkaran pejabat-pejabat yang mungkin mengesampingkan kepentingan masyarakat umum dan pada khususnya kaum perempuan. Kabupaten Mamasa dalam pemilu serentak, secara khusus pemilihan legislatif periode 2019-2024 yang dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia, telah berhasil dan mendudukkan wakil-wakil rakyat, yang di dalamnya politisi perempuan juga terlibat, sebagai bukti kepercayaan masyarakat terhadap kaum perempuan, yang benar-benar mau mendedikasikan diri sebagai penyambung aspirasi rakyat dan pembangunan masyarakat. Dari hasil pemilihan umum serentak Tahun 2019 yang lalu, bahwa perolehan kursi di DPRD Kabupaten Mamasa 4 orang adalah perempuan, ini berarti bahwa keterwakilan perempuan untuk duduk

di anggota legislatif menurut ukuran kabupaten Mamasa sudah cukup dan wajar, artinya bahwa dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap politisi Perempuan.

Penulis tertarik meneliti, mengapa politisi Perempuan di Kabupaten Mamasa dalam lingkaran politik sejak terbentuknya Kabupaten Mamasa tahun 2002 politisi Perempuan belum pernah menduduki posisi tertinggi di anggota legislatif hingga pada hari ini. Bagaimana persepsi Masyarakat terhadap politisi Perempuan sehingga masih kurang ditengah buramnya kesetaraan gender. Khususnya di daerah pedesaan , yang sumber daya manusianya masih kurang , khususnya melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Demikian juga dengan seseorang politisi perempuan yang terpilih melalui tanggung jawab besar yang menyambung sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Mamasa daerah pemilihan (*dapil III*) Kabupaten Mamasa dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan bahwa kinerja politisi perempuan tersebut sangat di harapkan oleh masyarakat di dapilnya. Politisi perempuan tersebut yang walaupun dua tanggung jawab besar, sebagai anggota legislatif , diharapkan mampu membagi tugas sekaligus menyelaraskan tugas sebagai ibu pembina PKK pada Desanya, sehingga perhatian terhadap masyarakat benar-benar ada. Perhatian kepada petani sebagai bagian dari daerah binaannya sangat diharapkan banyak pihak, termasuk pemberdayaan ibu PKK sehingga memperoleh nilai tambah di bidangnya masing-masing. Untuk mencapai semua ini dibutuhkan pembagian waktu yang baik, sehingga evaluasi dari rencana kerja dapat di laksanakan sesuai jadwal yang ada. Salah satu indikator yang membuktikan bahwa politisi perempuan tersebut akan dapat melaksanakan tugas pokoknya . adalah dengan tidak memperhitungkan jumlah pemilihnya disuatu daerah. Banyak

atau sedikit tetap mendapat perhatian, dan pembinaan serta menampung aspirasi masyarakat pada umumnya , untuk menjawab solusi dari permasalahan yang mereka hadapi demi kemajuan daerahnya. Ini tidak luput dari bagaimana politisi perempuan mempunyai kerinduan untuk menggapdi kepada masyarakat yang di landasi oleh streotip (*atau sifat ke ibuan/kewanitaan*) yang selalu konsikuen terhadap apa yang di ucapkan. Dan tentunya bermodal dari partai pengusung yang menolak segala sesuatu yang tidak relefan (*menolak peniti emas*) sebagai lambang kesederhanaan demi membangun masyarakat, dan inilah yang didambahkan masyarakat . dari komisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamasa yang di bidangnya ada beberapa kebijakan yang sudah di keluarkan yang tentunya arah dan tujuannya mendorong atau merangsang pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik.

1.2 Rumusan masalah

Permasalahan utama pada penelitian ini yaitu tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja politisi Perempuan di DPRD kabupaten Mamasa tahun 2019-2024 masih cenderung kurang dan masih menganggap perempuan kalah saing dengan politisi laki-laki.

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan tersebut.?

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terhadap kinerja politisi perempuan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan, kinerja politisi perempuan di Mamasa pada umumnya dalam pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu spesifik gender .

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi kehadiran politisi perempuan dalam mencerminkan keberagaman masyarakat dan memberikan contoh yang lebih baik bagi perempuan lain, dalam pengambilan keputusan politik. Kehadiran politisi perempuan dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik terhadap isu-isu yang di hadapi oleh perempuan dalam masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan DPRD yang ada di Kabupaten Mamasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk memberikan inspirasi baru untuk peneliti selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian, dalam studi ini terdapat *lima* (5) penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penelitian ini sebagai berikut.

Penelitian terdahulu

No.	Nama peneliti dan judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Daya juang dan daya Tangguh politisi perempuan dalam penanganan pemilu .	Metode deskriptif - kualitatif	Berdasarkan penelitian bagaimana Sri Mulyani mengkapitalisasi strategi modalitas dalam merawat konstituen yang berdampak terhadap kemenangan Sri Mulyani dipemilu sehingga menjadi anggota legislatif pertama tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta

	Oleh : Muhammad Akbar, Rafsanjani, Fitriah, Nurhidayat Sardini (2015)		melihat terbentuknya regulasi penggunaan strategi dengan pertama dengan modalitas yang di miliki Sri Mulyani . peneliti mengemukakan kemenangan tiga (3) periode yang dialami Sri Mulyani itu merupakan hasil dari daya juang dan daya Tangguh yang di miliki Sri Mulyani.
2.	Evaluasi kinerja politisi perempuan anggota perwakilan rakyat daerah DPRD. Oleh : Dedy, Nur Khaerah, Rudy Hardi (2014-2019)	Metode deskriptif - kualitatif	Berdasarkan undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 150 huruf a , mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam fungsi legislasi sesuai aturan daerah yang dibahas Bersama bupati/wali kota untuk mendapat persetujuan Bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan peraturan daerah DPRD hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Ada lima (5) indikator untuk mengukur kinerja politisi perempuan di DPRD sinjai dalam pelaksanaan fungsi legislasi .

3.	Perspektif media massa terhadap politisi perempuan dalam rezim negara dalam perspektif negara islam. Oleh : Lutfi Basit, Syukur Kolil, Hasan Sazali. (2022)	Metode deskriptif-kualitatif	Politisi perempuan ditampilkan oleh media massa tradisional dan online dalam perspektif gender yang negatif secara kuantitas dan kualitas yang dikemas dalam tiga teori patriarki, objektifikasi dan stereotip. Tampilan positif perempuan dalam kategori patriarki lebih banyak digunakan oleh media massa dibanding kategori lainnya. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa perempuan lebih dan sudah banyak mengambil peran-peran dalam struktur sosial terutama dalam politik. Media massa melemahkan politisi perempuan dengan melemahkan politisi perempuan dengan mengkombinasikan isu gender dengan isu ras dari pada memilih isu kombinasi isu gender dengan ideologi secara simultan dalam liputannya. Kombinasi gender dan ras berdampak lebih negatif terhadap politisi perempuan, sedangkan kombinasi
----	---	-------------------------------------	---

			gender dengan ideologi potensial berdampak positif. Dengan demikian media massa bukan Gerakan mengurus utamakan gender.
4.	Strategi komunikasi politisi perempuan Oleh : Muhammad Edy Susilo, Nurul Latifatun Nisa.	Metode deskriptif - kualitatif	Indonesia yang luas , masih menganut patriarki di berbagai daerah. Payung hukum yang mendorong partisipasi politik perempuan perlu didukung dengan perubahan sosial yang memadai. Ada sebuah ambiguitas dimana seseorang perempuan diizinkan untuk beraktifitas di sektor publik dan kontribusi dalam sektor keluarga, akan tetapi jika ia menempati posisi pemimpin, masih banyak pembatasan itu berasal dari argument agama maupun sosial budaya. Stereotip gender masih melekat dengan kuat dibenak masyarakat. Perempuan diberi label dan penilaian yang berbeda dengan laki-laki pada saat yang sama para politisi dan calon politisi perempuan pun berkomunikasi dengan

			melaggengkan streotip ini. Citra perempuan sebagai ibu yang mengayomi dan mengasihi digunakan oleh politisi untuk meraih suara dalam pemilu. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh politisi perempuan masih dalam rangka mengukuhkan streotip yang ada. Mereka melakukan komunikasi dengan cara yang lebih nurturing memposisikan diri sebagai ibu dan berkomunikasi dengan kelembutan, baik verbal maupun nonverbal. Merekah memilih sasaran pemilih perempuan sebagai sasaran utama dan laki laki sebagai sasaran berikutnya.
5.	Persepsi masyarakat terhadap perempuan di ranah politik lokal bulukumba	Metode deskriptif - kualitatif	Persepsi masyarakat bulukumba terhadap perempuan di ranah politik lokal , belum sepenuhnya mendukung perempuan untuk terlibat di ranah politik, hal tersebut dapat diketahui dari beberapa penjelasan sebagai berikut, 1. Budaya patriarki yang masih melekat di

	Oleh : Jusri Adi, FITRIANI SARI HANDAYANI RAZAK , Hendri Kurniawan .		masyarakat terhadap perempuan hanya hanya mengurus rumah tangga. 2. Hanya sebagai perempuan yang sudah berani keluar dari lingkungan domestik ke lingkungan publik, mereka sudah sadar bahwa adanya kesetaraan gender.
--	--	--	---

1. Persamaan dan perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaan adalah daya juang dan daya Tangguh Sri Mulyani mampu bertahan menjadi anggota legislatif selama tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan penelitian saya yaitu persepsi Masyarakat terhadap kinerja politisi Perempuan DPRD Kabupaten Mamasa selama dua periode . Perbedaan penelitian yaitu : daya juang dan daya Tangguh Sri Mulyani sehingga bisa bertahan selama tiga periode di DPRD, Penelitian saya kinerja politisi Perempuan anggota DPRD Kabupaten Mamasa terpilih selama dua periode. Dari politisi perempuan yakni Sri Mulyani mampu bertahan selama tiga periode yakni pemilu 2009, pemilu 2014, dan pemilu 2019 yang berasal dari partai Amanat nasional Dari persamaan tulisan saya yaitu menceritakan kisah seorang politisi perempuan yang mampu mengemban tugasnya dengan baik.
2. Persamaan dan perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaan evaluasi kinerja perempuan anggota perwakilan rakyat daerah DPRD Kabupaten Sinjai. dan penelitian saya adalah persepsi

masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa. Perbedaan penelitian adalah mengevaluasi kinerja politisi perempuan di DPRD, Dan penelitian saya yaitu persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan . Di Kabupaten Sinjai sudah terdapat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator produktivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dinilai dapat menjadi penyumbang aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

3. Perbedaan dan persamaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaan adalah sama-sama meneliti tentang politisi perempuan dan perbedaannya adalah perspektif media massa terhadap politisi perempuan dalam rezim negara islam, penelitian saya adalah persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa. Dalam masa kampanye, politisi perempuan tetap diberi ruang di media berita yang terbatas dan hampir tidak terlihat sebagai subjek cerita dan berbagai sumber berita. Tampilan negatif politisi perempuan dalam kategori patriarki lebih banyak digunakan oleh media massa dibanding kategori lainnya. Jadi dalam pembahasan ini menceritakan bagaimana politisi perempuan ditampilkan oleh media massa tradisional dan online dalam perspektif gender yang negatif secara kualitas dan kuantitas yang dikemas dalam tiga kategori patriarki dan stereotip.

4. Persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu: persamaan komunikasi politisi perempuan di sektor publik dan kontribusi dalam sektor keluarga, sedangkan penelitian saya kinerja politisi perempuan di DPRD kabupaten Mamasa. Perbedaannya adalah strategi komunikasi politisi perempuan di sektor publik, sedangkan penelitian saya adalah persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa. Perempuan memiliki suara sebagai pemilih dan mayoritas penduduk di Indonesia. Hak pilih perempuan dapat menghasilkan perubahan. Selain suara sebagai pemilih perempuan juga bisa turut serta berpartisipasi dalam iklim politik,
5. Persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaan persepsi masyarakat terhadap perempuan di ranah politik lokal bulukumba, penelitian saya adalah persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan di kabupaten Mamasa. Perbedaan penelitian saya adalah persepsi masyarakat bulukumba terhadap perempuan di ranah politik lokal, penelitian saya adalah persepsi masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa. Hasil pemilihan legislatif tahun 2019 anggota legislatif perempuan yang terpilih terdapat 8 orang yang terpilih di bulukumba. Partisipasi perempuan di ranah politik memiliki pro dan kontra dengan melihat berbagai pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya mengurus rumah tangga dan perempuan masih menyukai lingkungan keluarga dibanding lingkungan publik.. Jadi masyarakat di bulukumba masih meragukan politisi perempuan. Adapun persamaan dari

tulisan ini adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap politisi perempuan. Dan perbedaan penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian.

2.2 Landasan teori

1. Teori Persepsi

Menurut Wainin Przeworski Stokes dalam Irwanto (2008) untuk melihat kemampuan kinerja anggota dewan dalam menyikapi aspirasi Masyarakat dapat dilihat dari indikator yaitu Responsivitas, Reabilitas, dan Akuntabilitas. Responsivitas adalah kemampuan anggota legislatif dalam mentransformasikan berbagai aspirasi Masyarakat dalam kebijakan publik. Reabilitas adalah berkaitan dengan kemampuan anggota legislatif dalam mentransformasikan berbagai isu-isu dan program yang mereka tawarkan pada saat kampanye kedalam suatu kebijakan publik.

2.3 Pengertian persepsi.

Secara etimologi, persepsi atau dalam Bahasa Inggris *perception* berasal dari Bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai

suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organnya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.¹

Menurut William James (1842-1910) persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta Sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan kita. Bimo Walgito (2004) mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

2.4 Jenis-jenis Persepsi

memiliki lambang fisik, terhadap terhadap manusia melalui lambang-lambang Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu: persepsi terhadap objek dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi tersebut perbedaan yaitu: persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan

¹ Jurnal Taufik Nurohman, wiwi Widiastuti, kinerja DPRD tasikmalaya , vol. 4 no. 1 januari 2012 hal. 629

- persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam.
- Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas disekelilingnya ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial yaitu:

1. persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang. Objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian yang serupa.
2. persepsi bersifat kolektif. Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut.
3. persepsi bersifat dugaan. Terjadi karena data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun.
4. persepsi bersifat evaluatif. Artinya kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan tetapi, terkadang

alat-alat indra dan persepsi kita menipu kita sehingga kita juga ragu terhadap persepsi kita terhadap realitas sebenarnya.

5. Persepsi bersifat kontekstual. Maksudnya bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan oleh karenanya juga persepsi kita.

2.5 Ciri-Ciri Umum Persepsi

Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi, ciri-ciri tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Modalitas: rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indra.
- b. Dimensi ruang: persepsi mempunyai sifat ruang: kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang, dan lain-lain.
- c. Dimensi waktu: persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda dan lain-lain.
- d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.

- e. Dunia penuh arti: persepsi adalah dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna kita, yang ada hubungannya dalam diri kita.²

Dari beberapa ciri-ciri persepsi di atas, kita dapat melihat bahwa alat-alat indra manusia sangat berpengaruh dalam proses pembentukan sebuah persepsi di atas, kita dapat melihat bahwa alat-alat indra manusia sangat berpengaruh dalam proses pembentukan sebuah persepsi. Alat-alat indra yang dimiliki manusia menyebabkan manusia mampu berpikir, merasakan dan memiliki persepsi tertentu mengenai dan dunia disekitarnya. Persepsi dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan dari luar alat indra kita. dari stimulus tersebut alat indra kita kemudian memprosesnya sehingga kita dapat menentukan atau menafsirkan informasi dari apa yang terjadi.

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indra namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya Tarik yang sama. Menurut Rhenal Kasali, persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Budaya

Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistim nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas.

b. Pengalaman masa lalu

Audience atau khalayak, umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh audiens. Selama audiens menjalin hubungan dengan objek, ia akan melakukan penilaian. Pada produk-produk tertentu, biasanya pengalaman dan relasi itu tidak hanya dialami oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang sekaligus. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek.

c. Nilai-nilai yang dianut

Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, memberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, oleh karena itu nilai bersifat stabil dan sulit berubah.

2.7 Aspek-aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut ada tiga yaitu:

1. Komponen Kognitif

Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut.

2. Komponen afektif

Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.

3. Komponen Konatif

Merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak laku yang berhubungan dengan objek sikapnya.

Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan objek itu. Sebaliknya jika ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu objek, maka ia akan mengecam, mencela, menyerang dan bahkan membinasakan objek itu.

2.8 Teori Gender

Kata gender sudah digunakan di Amerika sebagai suatu bentuk dari perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler dan agama untuk menyalurkan eksistensi Wanita yang kemudian melahirkan kesetaraan gender. Beberapa kesetaraan gender yang disusun Faisal, mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap pria dan Wanita. Gender bukan hanya sekedar perbedaan antara wanita dan pria yang dilihat dari konstruksi sosial budaya, akan tetapi lebih pada penekanan konsep dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Oleh karenanya kata gender banyak disandingkan dengan kata seperti ketidakadilan gender dan kesetaraan gender dalam masyarakat (M. Faisal 2020)

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan dilihat dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan cenderung lebih lemah dari pada laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan

dalam keahliannya. Sedangkan pemikirannya tentang perempuan sebagaimana pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologi, dan sosial, terbagi atas dua factor yaitu faktor fisik dan psikis, secara biologis perempuan cenderung lebih kecil ketimbang laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi sedikit lebih cepat, fisik perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan cenderung mempunyai pembawaan yang lemah, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.

Dalam konsep gender ditekankan bahwa perbedaan sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun kaum perempuan merupakan hasil hubungan sosial dan budaya. Misalnya bahwa kecenderungan perempuan dikenal lemah lembut ketimbang laki-laki. Kesadaran perempuan yang lebih maju, mulai muncul sejak perempuan pertama yang memperjuangkan perempuan dalam hal ini Kartini telah memperjuangkan hak-hak perempuan atas Pendidikan serta poligami keluarga dan masyarakat. Sebagai pendidik generasi penerus bangsa dan negara. Menurutnya perempuan sebaiknya memperoleh Pendidikan yang cukup dan posisi yang strategis dalam masyarakat. Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebut dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum ada dua peran utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, badan legislatif adalah badan pembuat undang-undang. Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh

bangsa. Yang kedua, Lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan menurut *Sanit* (1985) . *Suwondo* (2016) mengatakan bahwa aktifitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai berikut.:

1. Fungsi perwakilan , melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam Lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
2. Fungsi perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang. Fungsi pengawasan, dimana Lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan pengawasan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan Lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak.³

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung-jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah

³ Buku : Mintarti Indartini, Nurharipnu Wibisono, Assistriadi Widjiseno. Peren dan fungsi DPRD dalam perencanaan penerbit . taujih@gmail . com cetakan 1 desember 2019.
JURNAL review Pendidikan dan pengajaran, vol 7 , nomor 4, 2024

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. *Sugihartono, dkk (2007:8)* mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam pengindraan.

2.9 Keterwakilan perempuan di ranah penyelenggara pemilu

Lembaga pemilu di Indonesia dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan bentuk. Perubahan ini mengikuti perubahan dalam peraturan mengenai pemilu, yang dipengaruhi oleh perkembangan dinamika politik Indonesia secara lebih luas. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Lembaga penyelenggara pemilu sangat ditentukan arah kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak sekedar menyelenggarakan pemilihan secara rutin pemimpin dan wakil rakyat, Lembaga ini juga harus memastikan proses pergantian pemimpin politik di negara ini berlangsung adil dan setara. Lembaga penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok-kelompok yang cenderung terabaikan dalam proses pemilu, misalnya kelompok perempuan. Partisipasi perempuan dalam pemilu dan keterwakilannya dalam Lembaga penyelenggara pemilu harus terus didorong. Kehadiran perempuan dalam pemilu dan Lembaga penyelenggara pemilu telah memiliki landasan hukum dalam aturan terkait, demi menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Kehadiran perempuan dalam Lembaga penyelenggara pemilu sangat penting dalam upaya mempengaruhi politik, dalam hal ini proses electoral, dengan perspektif perempuan. Data-data

mengenai keterwakilan perempuan di ranah penyelenggara pemilu penting untuk melihat jumlah dan paparannya, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk menilai sejauh mana partisipasi dan capaian para perempuan di dalam ranah penyelenggara pemilu.

2.10 Hubungan kerja DPRD dan kepala daerah

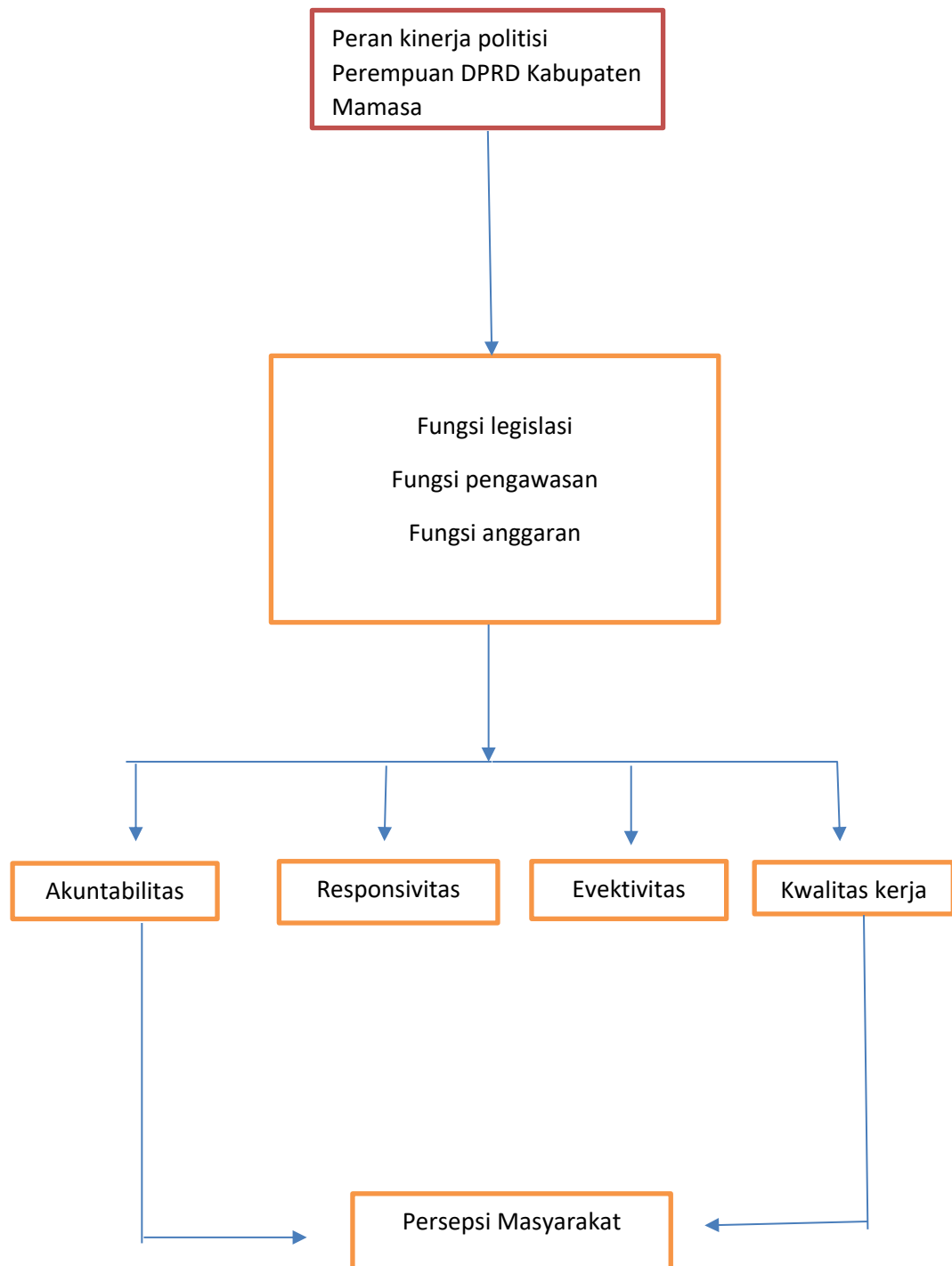
Menurut pengertiannya dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah ini. Maka pengertian dari kepala daerah adalah unsur kepala daerah dan dewan perwakilan rayat daerah kedua unsur pemerintah ini memiliki suatu bentuk kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut kartapradja (2014”127) bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1974 dengan tugas menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Sehubungan dengan bentuk kerja antara unsur dewan perwakilan rakyat daerah dengan pemerintah daerah, maka menurut Kartapraja (2010,191) maka kontruksi dari undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah yang menetapkan kepala daerah adalah pemerintah daerah sebagai Lembaga otonom bertugas untuk menjalankan semua hak, wewenang untuk dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintah daerah dan pergantian mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini berarti kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, baik sendiri-sendiri maupun sama-sama menyelenggarakan peraturan dan pengurusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

2.11 Kedudukan DPRD dalam tata pemerintahan

Kedudukan hukum DPRD pada era reformasi telah mengalami proses reposisi yang mencakup radikal. Di era orde baru, kedudukan DPRD adalah salah satu unsur dari pemerintahan daerah atau eksekutif pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1974. Ini berarti DPRD diposisikan sebagai mitra kepala daerah dalam perumusan sekaligus implementasi kebijakan di daerah, dari pada sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang kekuatan eksekutif yang sangat besar. Dalam kedudukannya yang demikian, sangatlah wajar , oleh karna itu dalam pasal 14 undang-undang no 22 tahun 1999 kedudukan DPRD dikembalikan sebagai fungsi aslinya yaitu sebagai badan legislatif. Seiring dengan fungsi barunya ini, DPRD diberikan juga hak untuk meminta pertanggung jawaban kepada daerah, sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi dalam era orde baru.

Dalam rezim UU nomor 32 tahun 2004, DPRD tidak lagi menjadi Lembaga legislatif daerah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih dan memakzulkan kepala daerah tetapi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai kepala daerah. Kepala daerah dan anggota DPRD dalam UU nomor 32 tahun 2004 dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD karena memiliki kedudukan yang setara dan keduanya bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.

2.12 Kerangka pikir



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Kabupaten Mamasa yang terbilang masih mudah yang di mekarkan dari Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 2002. Keterwakilan Perempuan masih sangat terbatas bahkan pada pemilihan umum pada tahun 2019-2024 dan pada tahun 2024 yang pada dua periode tersebut hanya di isi 4 kursi dan tidak ada figur baru yang muncul ke empat calon yang terpilih dari dua periode pemilu yang di catat terbanyak wakil Perempuan dari legislatif.

Demikian pula dengan adanya regulasi pemerintah yang mengatur kuota 30% keterwakilan Perempuan dari parlemen tidak berpengaruh terhadap jumlah keterwakilan Perempuan, di badan legislatif Kabupaten Mamasa. Dari penelitian yang dilakukan pada responden, disampaikan bahwa, meskipun politisi Perempuan di Kabupaten Mamasa tidak kalah dengan kaum laki-laki dari sumber daya manusianya, tetapi Masyarakat masih meragukan kinerja politisi Perempuan, baik di legislatif . ditandai dengan hasil penelitian dengan indikator sebagai berikut :

1. akuntabilitas dengan nilai yang diperoleh 2,25 baik
2. efektivitas dengan nilai yang diperoleh yaitu 2,35 masih cukup baik
3. responsifitas dengan nilai diperoleh yaitu 2,75 masih cukup baik
4. kualitas kerja dengan nilai yang diperoleh yaitu 2,73 cukup baik

5.2 Saran

Dari Kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang diberikan menyangkut penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada anggota legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Mamasa dalam menjalankan program kerja yang lebih merata kepada Masyarakat karna Sebagian masih belum merasakan kinerja politisi Perempuan, namun sudah ada Sebagian Masyarakat menerima bantuan.
2. Diharapkan kepada politisi Perempuan untuk lebih memperhatikan kasus kekerasan Perempuan dan anak

DAFTAR PUSTAKA

- Mintarti Indartini, Nurharupnu Wibisono, assistriadi Widjisen, *peran fungsi DPRD dalam perencanaan dan penganggaran daerah*, 1 desember 2019,
- Sri Muallidiah, S.Sos, M.Si, *posisi dewan perwakilan rakyat daerah dalam sistem pemerintahan daerah*, pekanbaru, 24 april 2016.
- menyoal data representasi perempuan di lima ranah*, maret, 2022.
- Amalika Gitamaharani Arya 2015, *Refresentasi pemimpin perempuan dalam Film The Iron Lady*. Universitas Udayana, fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik, Halaman 9
- Evaluasi Kinerja politisi perempuan anggota dewan perwakilan daerah*, volume 2 nomor 1 tahun 2021, prodi ilmu pemerintahan fisisp Universitas islam majapahit, JIPMP @2021
- ilmu komunikasi, *strategi komunikasi politisi perempuan*, Volume 16 1, januari -april 2018, Muhammad Edy Susilo dan Nurul Lutfatum Nisa, program studi ilmu komunikasi UPN veteran yongyakarta. halaman 64.
- Jusriadi@anismuh.ac.id, <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i1.7267>, administrasi publik, April (2022) *persepsi masyarakat terhadap perempuan di ranah politik lokal kabupaten bulukumba*, volume 8 nomor 1, halaman 136.
- Pendidikan islam, *perspektif media massa terhadap politisi perempuan dalam tiap rezim negara dalam perspektif Pendidikan islam*, volume 11 /NO. 01 Februari 2022. Halaman 1003

¹kajian politik islam ,Wahyudi ,(2018) *peran politik perempuan dalam perspektif*

Gende volume.1 nomor.1, halaman 6 <http://journaluinmataram.ac.id/index.php/politea>.

Sintya Galuh Rusianti (2022), *peran perempuan dalam komunikasi politik partai di*

kotamedium, volume.1 halaman 31 , <https://jurnal.institutsunandoe.ac.ad/index.php/society> .

Jurnal Taufik Nurohman, wiwi Widiastuti, kinerja DPRD tasikmalaya , vol. 4 no. 1 januari 2012 hal. 629